

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

**Perkembangan inflasi di Kota Tangerang Selatan pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan pola volatilitas tinggi namun masih berada dalam batas yang terkendali.** Kenaikan harga mayoritas disebabkan oleh komoditas yang tergantung pada musim panen (cabai merah, cabai rawit dan bawang merah) dan komoditas dengan permintaan tinggi (telur ayam ras dan daging ayam ras) serta ketergantungan impor (bawang putih).

Link grafik :  
[https://drive.google.com/drive/folders/1Ao8zATDIH\\_Gth-fkrenC1YG-H2-jX3Fr?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Ao8zATDIH_Gth-fkrenC1YG-H2-jX3Fr?usp=drive_link)

**Ketergantungan pada Daerah Sentra akan meningkatkan risiko rantai pasokan,** karena gangguan, perubahan harga, masalah kualitas, atau kegagalan dapat secara langsung memicu lonjakan harga, yang pada akhirnya mengancam stabilitas harga bahan pokok penting dan ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kota Tangerang Selatan bukan daerah produsen pangan utama sehingga **ketergantungan terhadap daerah lain menyebabkan harga pangan mudah bergejolak** karena pasokan tidak stabil dan gangguan di daerah pemasok (gagal panen, bencana alam, hambatan distribusi, panen raya) serta gangguan distribusi akan langsung berdampak pada inflasi di Kota Tangerang Selatan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

**Dalam Triwulan III Tahun 2025, Kebijakan TPID didominasi oleh strategi Komunikasi Efektif dan Keterjangkauan Harga.** Keterjangkauan Harga yang menjadi fokus utama adalah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran Minyak Kita, bantuan pangan beras SPHP untuk stabilisasi harga, melakukan pemantauan harga di Pasar Pantau secara rutin serta pendampingan/evaluasi harga pangan di atas HET/HAP. Dalam Ketersediaan Pasokan, TPID berupaya meningkatkan produksi pangan melalui kegiatan Tanam Benih Jagung, Panen Bawang Merah, Gerakan Menanam Serentak, Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dan Tanaman Hidroponik untuk kelompok tani. Sedangkan Kelancaran Distribusi diupayakan pada perbaikan infrastruktur dan layanan logistik melalui Peluncuran Bus Sekolah Gratis dan Aplikasi SIOPTIMUS serta Penerbitan Pasar Serpong. Komunikasi Efektif dengan 18 kegiatan mencerminkan kuatnya fungsi Koordinasi dan Akuntabilitas.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kota Tangerang Selatan menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan lahan pertanian, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Hal ini menyebabkan rentannya ketersediaan pasokan terhadap gangguan distribusi. Selain itu, belum tersedianya data pasokan pangan dan data agen/distributor/pemasok secara real-time menyulitkan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan harga secara dini, dan penilaian kecukupan pasokan untuk Masyarakat serta pengawasan harga guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.

- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menyebabkan keterbatasan anggaran daerah, sehingga membatasi kapasitas pelaksanaan program pengendalian inflasi secara optimal. Ketiadaan peta jalan yang komprehensif dan terintegrasi membuat pelaksanaan program TPID tidak terarah. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman anggota TPID terhadap prioritas dan cakupan program pengendalian inflasi.
- Meskipun telah dilakukan inisiasi kerja sama dengan beberapa kabupaten/kota penghasil pangan, belum ada tindak lanjut konkret dalam bentuk perjanjian atau mekanisme pemenuhan pasokan. Potensi stabilisasi harga melalui kolaborasi lintas daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Komitmen dan sinergi dari semua pihak perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi gejolak harga di masa mendatang. Langkah konkrit masih perlu terus dilakukan melalui optimalisasi pemantauan harga dan stok pangan, percepatan kerja sama antar daerah dengan mewujudkan perjanjian kerjasama, pembentukan pusat logistik pangan, meningkatkan intensitas operasi pasar dan gerakan pangan murah, menetapkan peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027, optimalisasi gerakan menanam dan kios pangan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya diversifikasi konsumsi pangan, mempercepat realisasi belanja daerah, menjaga keamanan daerah, menjamin kelancaran lalu lintas, melibatkan media serta platform digital dalam penyampaian informasi terkait tren harga dan upaya pengendalian inflasi.